BAGIAN ANGGARAN 093

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
TAHUN ANGGARAN 2010

(Audited)

Jln. H.R Rasuna Said Kav. C.1 Kuningan Jakarta Selatan 12920
Telepon (62-21) 2557 8300, Faks (62-21) 528 92456, http://www.kpk.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang APBN Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah salah satu Lembaga Negara yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan disertai Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan TA 2010, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja. Berdasarkan laporan ini, Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) netto yang dihasilkan KPK pada TA 2010 adalah sebesar Rp192.465.480.067,00 atau 125,89 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp152.980.250.000,00. Sementara itu, realisasi Belanja Negara netto TA 2010 adalah sebesar Rp268.002.903.040,00 atau 52,70 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA sebesar Rp508.507.348.000,00;
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas KPK TA 2010. Dari neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai aset adalah sebesar Rp774.750.005.953,00 dan kewajiban sebesar Rp3.891.752.442,00, sehingga ekuitas dana (kekayaan bersih) Komisi Pemberantasan Korupsi per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp770.858.253.511,00;
3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang rencana strategis, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca;
4. Laporan keuangan TA 2010 ini berstatus sebagai laporan keuangan yang telah diperiksa (*audited*) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kami menyadari bahwa laporan keuangan TA 2010 ini masih belum sempurna. Oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola

pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Jakarta, April 2011
Sekretaris Jenderal
Komisi Pemberantasan Korupsi,

Bambang Sapto Pratomosunu
NIP 19521107.197901.1.001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Indeks Singkatan	v
Indeks Catatan atas Laporan Keuangan	vi
Pernyataan Tanggung Jawab	viii
I. Ringkasan	1
II. Laporan Realisasi Anggaran	3
III. Neraca	5
IV. Catatan Atas Laporan Keuangan	6
A. Penjelasan Umum	6
A.1. Dasar Hukum	6
A.2. Kebijakan dan Strategi Pemberantasan Korupsi oleh KPK	6
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	11
A.4. Kebijakan Akuntansi	11
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	16
B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran	16
B.2. Penjelasan per Pos Laporan Realisasi Anggaran	16
B.3. Catatan Penting/Pengungkapan Lainnya	24
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	28
C.1. Posisi Keuangan Secara Umum	28
C.2. Penjelasan per Pos Neraca	29
C.3. Catatan Penting/Pengungkapan Lainnya	39
D. Pengungkapan Penting Lainnya	40

Laporan-laporan pendukung sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 65/PB/2010

- Lampiran 1
  - LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan
  - LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja
- Lampiran 2
  - Neraca Percobaan
- Lampiran 3
  - Laporan Barang Pengguna Tahunan
  - Laporan Kondisi Barang
- Lampiran 4

  Daftar Terpidana yang Belum Membayar Uang Pengganti, Biaya Perkara, dan Denda

- Lampiran 5

  Data Benda Sitaan KPK
- Lampiran 6

  Daftar Temuan BPK dan Tindak Lanjutnya
- Lampiran 7

  Laporan Rekening KPK
- Lampiran 8

  Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual

DAFTAR SINGKATAN

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
BLU	:	Badan Layanan Umum
BPK	:	Badan Pemeriksa keuangan
BUN	:	Bendahara Umum Negara
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
MA	:	Mata Anggaran Penerimaan/Pengeluaran
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
SIMAK-BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SAI	:	Sistem Akuntansi Instansi
SAK	:	Sistem Akuntansi Keuangan
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SKPA	:	Surat Kuasa Pengguna Anggaran
TA	:	Tahun Anggaran
TAB	:	Tahun Anggaran Berjalan
TAYL	:	Tahun Anggaran Yang Lalu
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
TPA	:	Tagihan Penjualan Angsuran
UP	:	Uang Persediaan

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

			Halaman
LAPORAN REALISASI APBN			
Pendapatan Negara dan Hibah			
Catatan	B.2.1	**Pendapatan Negara dan Hibah**	16
Catatan	B.2.1.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak	17
Belanja Negara			
Rupiah Murni			
Catatan	B.2.2	**Belanja Negara**	19
Catatan	B.2.2.1	Belanja Pegawai	22
Catatan	B.2.2.2	Belanja Barang	22
Catatan	B.2.2.3	Belanja Modal	23
Hibah			
Catatan	B.2.2.1	Belanja Pegawai	22
Catatan	B.2.2.2	Belanja Barang	22
Catatan	B.2.2.3	Belanja Modal	23
NERACA			
ASET			
		Aset Lancar	
Catatan	C.2.1.1	Kas di Bendahara Pengeluaran	29
Catatan	C.2.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	29
Catatan	C.2.1.3	Piutang Bukan Pajak	29
Catatan	C.2.1.4	Uang Muka Belanja	30
Catatan	C.2.1.5	Persediaan	30
		Aset Tetap	
Catatan	C.2.2.1	Tanah	32
Catatan	C.2.2.2	Peralatan dan Mesin	32
Catatan	C.2.2.3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	34
Catatan	C.2.2.4	Aset Tetap Lainnya	34
		Aset Lainnya	
Catatan	C.2.3.1	Aset Tak berwujud	35
Catatan	C.2.3.2	Aset Lain-lain	36

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek

Catatan	C.2.4.1	Utang Kepada Pihak Ketiga	37

EKUITAS

Ekuitas Dana Lancar

Catatan	C.2.5.1	Cadangan Piutang	38
Catatan	C.2.5.2	Cadangan Persediaan	38
Catatan	C.2.5.3	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang	38
Catatan	C.2.5.4	Barang/jasa yang Masih harus Diterima	38

Ekuitas Dana Investasi

Catatan	C.2.6.1	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	39
Catatan	C.2.6.2	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	39

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi (A*udited*) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana terlampir, merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, April 2011
Pimpinan,

M. Busyro Muqoddas
Ketua

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi (A*udited*) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana terlampir, merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, April 2011
Pimpinan,

M. Busyro Muqoddas
Ketua

Bibit Samad Rianto
Wakil Ketua

Chandra M. Hamzah
Wakil Ketua

Haryono
Wakil Ketua

Moch. Jasin
Wakil Ketua

I. RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 171/PMK.05/2007, menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Laporan Keuangan KPK TA 2010 (A*udited*) telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2010 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja, selama periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah netto (pendapatan setelah dikurangi pengembalian pendapatan) pada TA 2010 berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp192.465.480.067,00 atau 125,81 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp152.980.250.000,00.

Realisasi Belanja Negara netto (belanja setelah dikurangi pengembalian belanja) pada TA 2010 adalah sebesar Rp268.002.903.040,00 atau 52,70 persen dari anggarannya sebesar Rp508.507.348.000,00. Realisasi belanja tersebut berasal dari realisasi belanja rupiah murni dan hibah. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

	31 Desember 2010			31 Desember 2009	
	Anggaran	Realisasi Netto	%	Anggaran	Realisasi Netto
Pendapatan	**152.980.250.000**	**192.465.480.067**	**125,81**	**38.378.602.000**	**75.593.341.422**
Pendapatan Negara dan Hibah	152.980.250.000	192.465.480.067	125,81	38.378.602.000	75.593.341.422
Belanja	**508.507.348.000**	**268.002.903.040**	**52,70**	**461.735.388.000**	**228.560.300.967**
Belanja Rupiah Murni	431.065.431.000	264.761.561.505	61,42	315.235.856.000	220.948.475.584
Belanja Hibah	77.441.917.000	3.241.341.535	4,19	146.499.532.000	7.611.825.383

Rendahnya realisasi belanja disebabkan oleh:

(i) **Pelaksanaan kegiatan yang selalu mengedepankan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya sehingga terjadi penghematan dalam penggunaan anggaran operasional.**

(ii) **Adanya penghematan dari proses pengadaan barang dan jasa sebesar Rp 9,768 milyar.**

(iii) **Tidak masuknya realisasi hibah atas barang atau jasa ke dalam Laporan Realisasi Anggaran namun cukup diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah. Serta belum diajukannya pengesahan ke Kementerian Keuangan atas realisasi hibah Uni Eropa, CIDA, GTZ, dan USAID. Pengajuan pengesahan masih menunggu data dukung seperti rincian nilai atas barang dan jasa.**

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Jumlah Aset adalah sebesar Rp774.750.005.953,00 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp17.399.903.736,00; Aset Tetap sebesar Rp367.183.731.838,00; dan Aset Lainnya sebesar Rp390.166.370.379,00.

Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp3.891.752.442,00 merupakan kewajiban jangka pendek sebesar Rp3.891.752.442,00.

Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp770.858.253.511,00 terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp13.508.151.294,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp757.350.102.217,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2010 dan 2009 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

	31 Desember 2010	30 Desember 2009	Nilai Kenaikan/ (Penurunan)
Aset	**774.750.005.953**	**424.106.160.676**	**350,643,845,277**
Aset Lancar	17.399.903.736	15.202.901.879	2,197,001,857
Aset Tetap	367.183.731.838	209.842.259.085	157,341,472,753
Aset Lainnya	390.166.370.379	199.060.999.712	191,105,370,667
Kewajiban	**3.891.752.442**	**3.119.555.905**	**772.196.537**
Kewajiban Jangka Pendek	3.891.752.442	3.119.555.905	772.196.537
Ekuitas Dana	**770.858.253.511**	**420.986.604.771**	**349,871,648,740**
Ekuitas Dana Lancar	13.508.151.294	12.083.345.974	1,424,805,320
Ekuitas Dana Investasi	757.350.102.217	408.903.258.797	348,446,843,420

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu, dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010 DAN 2009

(Dalam Rupiah)

		TA 2010			TA 2009	
Uraian	**Catatan**	**Anggaran**	**Realisasi (Netto)**	**% Realisasi terhadap Anggaran**	**Anggaran**	**Realisasi**
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B.2.1.					
A.1 PENERIMAAN DALAM NEGERI		152.980.250.000	192.465.480.067	125,81	38.378.602.000	75.593.341.422
Penerimaan Perpajakan		0	0	0,00	0	0
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.1.1.	152.980.250.000	192.465.480.067	125,81	38.378.602.000	75.593.341.422
A.2 HIBAH		0	0	0,00	0	0
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.1 + A.2)		**152.980.250.000**	**192.465.480.067**	**125,81**	**38.378.602.000**	**75.593.341.422**
B. BELANJA	B.2.2.					
B.1 Rupiah Murni		**431.065.431.000**	**264.761.561.505**	**61,42**	**315.235.856.000**	**220.948.475.584**
Belanja Pegawai	B.2.2.1	219.471.849.000	157.599.309.217	71,81	159.370.276.000	141.845.566.682
Belanja Barang	B.2.2.2	131.933.045.000	67.184.682.306	50,92	117.611.497.000	61.829.471.162
Belanja Modal	B.2.2.3	79.660.537.000	39.977.569.982	50,18	38.254.083.000	17.273.437.740
Pembayaran Bunga Utang		0	0	0,00	0	0
Subsidi		0	0	0,00	0	0
Hibah		0	0	0,00	0	0
Bantuan Sosial		0	0	0,00	0	0
Belanja Lain-lain		0	0	0,00	0	0
B.2 Pinjaman Luar Negeri		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
Belanja Pegawai		0	0	0,00	0	0
Belanja Barang		0	0	0,00	0	0
Belanja Modal		0	0	0,00	0	0
Pembayaran Bunga Utang		0	0	0,00	0	0

Uraian	Catatan	TA 2010 Anggaran	TA 2010 Realisasi (Netto)	TA 2010 % Realisasi terhadap Anggaran	TA 2009 Anggaran	TA 2009 Realisasi
B.2 Pinjaman Luar Negeri (*lanjutan*)		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
Subsidi		0	0	0,00	0	0
Hibah		0	0	0,00	0	0
Bantuan Sosial		0	0	0,00	0	0
Belanja Lain-lain		0	0	0,00	0	0
B.3 Hibah		**77.441.917.000**	**3.241.341.535**	**4,19**	**146.499.532.000**	**7.611.825.383**
Belanja Pegawai	B.2.2.1	0	0	0,00	0	0
Belanja Barang	B.2.2.2	37.083.682.000	3.205.841.535	8,64	88.813.009.000	7.519.875.383
Belanja Modal	B.2.2.3	40.358.235.000	35.500.000	0,09	57.686.523.000	91.950.000
Pembayaran Bunga Utang		0	0	0,00	0	0
Subsidi		0	0	0,00	0	0
Hibah		0	0	0,00	0	0
Bantuan Sosial		0	0	0,00	0	0
Belanja Lain-lain		0	0	0,00		0
JUMLAH BELANJA (B.1+B.2+B.3)		**508.507.348.000**	**268.002.903.040**	**52,70**	**461.735.388.000**	**228.560.300.967**

Jakarta, 31 Desember 2010
Sekretaris Jenderal
Komisi Pemberantasan Korupsi,

Bambang Sapto Pratomosunu
NIP 19521107.197901.1.001

III. NERACA (*AUDITED*)

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 2009

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2010	31 Desember 2009
ASET			
Aset Lancar	C.2.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.1.1	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2.1.2	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.2.1.3	454.853.776	640.633.330
Uang Muka Belanja	C.2.1.4	33.181.500	249.002.600
Persediaan	C.2.1.5	16.911.868.460	14.313.265.949
Jumlah Aset Lancar		**17.399.903.736**	**15.202.901.879**
Aset Tetap	C.2.2.		
Tanah	C.2.2.1	119.363.101.000	0
Peralatan dan Mesin	C.2.2.2	151.890.411.266	126.990.225.832
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.2.3	52.273.044.234	40.749.350.665
Aset Tetap Lainnya	C.2.2.4	43.657.175.338	42.102.682.588
Jumlah Aset Tetap		**367.183.731.838**	**209.842.259.085**
Aset Lainnya	C.2.3		
Aset Tak berwujud	C.2.3.1	11.169.779.728	10.448.377.032
Aset Lain-lain	C.2.3.2	378.996.590.651	188.612.622.680
Jumlah aset Lainnya		**390.166.370.379**	**199.060.999.712**
JUMLAH ASET		**774.750.005.953**	**424.106.160.676**
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.2.4		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.2.4.1	3.891.752.442	3.119.555.905
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**3.891.752.442**	**3.119.555.905**
JUMLAH KEWAJIBAN		**3.891.752.442**	**3.119.555.905**
EKUITAS DANA			
Ekuitas Dana Lancar	C.2.5		
Cadangan Piutang	C.2.5.1	454.853.776	889.635.930
Cadangan Persediaan	C.2.5.2	16.911.868.460	14.313.265.949
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang	C.2.5.3	-3.891.752.442	-3.119.555.905
Barang/jasa yang masih harus diterima	C.2.5.4	33.181.500	0
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		**13.508.151.294**	**12.083.345.974**
Ekuitas Dana Investasi	C.2.6		
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	C.2.6.1	367.183.731.838	209.842.259.085
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	C.2.6.2	390.166.370.379	199.060.999.712
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		**757.350.102.217**	**408.903.258.797**
JUMLAH EKUITAS DANA		**770.858.253.511**	**420.986.604.771**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		**774.750.005.953**	**424.106.160.676**

Jakarta, 31 Desember 2010
Sekretaris Jenderal
Komisi Pemberantasan Korupsi,

Bambang Sapto Pratomosunu
NIP 19521107.197901.1.001

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*UNAUDITED*)

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual Pada Laporan Keuangan.

A.2. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI OLEH KPK

Rencana Strategis

RENCANA STRATEGIS

KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002, tugas KPK meliputi: melakukan koordinasi dan supervisi terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Visi

"Menjadi Lembaga yang Mampu Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi"

Misi

a) Pendobrak dan Pendorong Indonesia yang Bebas dari Korupsi

b) Menjadi Pemimpin dan Penggerak Perubahan untuk Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari korupsi.

Tujuan

Berkurangnya Korupsi di Indonesia

Kebijakan

Kebijakan KPK tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan 5 tugas KPK secara proporsional, baik program, sumber daya manusia, maupun anggaran.
2. Kegiatan penindakan dan pencegahan difokuskan kepada TPK yang memiliki *multiplier* dan *trickle down effect*, alokasi belanja dan pontensi pendapatan negara yang tinggi.
3. Seluruh unit pendukung memberikan kontribusi secara penuh bagi keberhasilan pencegahan dan penindakan TPK.
4. Penindakan diarahkan kepada sasaran TPK pada pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan sumber daya alam, penggunaan anggaran belanja dan pendapatan (APBN/APBD dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri), dan penyalahgunaan wewenang pada penegak hukum, legislatif, dan PN pada sektor pelayanan publik (pajak, bea cukai, perbendaharaan, imigrasi, BPN, BKPM).
5. Pencegahan diarahkan kepada penanganan kerawanan korupsi yang mencakup 30 delik korupsi, kehilangan kekayaan negara, penyimpangan dalam pelayanan publik dan mendorong aparat pengawasan internal terkait untuk menangani potensi masalah penyebab korupsi.
6. Internalisasi anti korupsi mulai difokuskan juga kepada dunia usaha (bisnis).
7. Meningkatkan peran serta masyarakat dengan prioritas sektor swasta, tokoh agama, pemuda/mahasiswa/pelajar, dan organisasi politik dalam setiap upaya pencegahan dan penindakan TPK.

Kebijakan dalam penentuan prioritas pelaksanaan tugas KPK adalah:

Prioritas Nasional :

Prioritas Bidang	:	Penyelenggaraan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik
Fokus Prioritas	:	Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN
Program	:	Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Kegiatan Prioritas	:	1. Peningkatan Penanganan Kasus Korupsi 2. Peningkatan Pencegahan Korupsi 3. Sosialisasi Kebijakan Pemberatasan Korupsi

Prioritas KPK :

Program	:	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Kegiatan	:	1. Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi 2. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi 3. Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Penuntutan dan Eksekusi Tindak Pidana Korupsi 5. Pengelolaan LHKPN 6. Pengelolaan Gratifikasi 7. Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi, dan

Kampanye Anti Korupsi

8. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan KPK, serta Pengkajian Sistem Pengelolaan Administrasi di Semua Lembaga Negara dan Pemerintah;
9. Penanganan Pengaduan Masyarakat

SASARAN

1. Terwujudnya perilaku anti korupsi dan dukungan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi.
2. Tercegahnya kesempatan untuk korupsi.
3. Penindakan yang kuat dan pro aktif.

STRATEGI

Strategi besar yang dikembangkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, kebijakan, dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Strategi Deteren, bahwa tindakan KPK harus dapat menimbulkan efek penjeraan bagi pelaku korupsi baik pada bidang penindakan maupun bidang pencegahan korupsi.
2. Strategi Komprehensif, bahwa pemberantasan korupsi (terdiri dari tindakan penindakan dan pencegahan) tidak dapat dilakukan sendirian oleh KPK, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama dengan segenap komponen bangsa sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan serta peran masing-masing.
3. Strategi Pemicuan, bahwa sesuai peran yang dimainkan KPK sebagai *trigger mechanism*, KPK berfungsi mendobrak kebekuan penindakan Tindak Pidana Korupsi dan mendorong pelaksanaan tugas aparat pemerintah dan Lembaga Negara untuk bekerja secara benar (sesuai dengan hukum yang berlaku) serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.
4. Strategi Pemulihan, bahwa terjadinya Tindak Pidana Korupsi menimbulkan akibat bagi masyarakat, bangsa dan negara baik secara fisik, materiil maupun psikhis, yang harus dipulihkan dengan mengembalikan kerugian keuangan Negara melalui *asset recovery,* memperbaiki sistem yang telah dirusak oleh korupsi melalui kegiatan monitoring kegiatan administrasi Negara dan pemulihan kondisi kerusakan mental masyarakat melalui upaya membangun budaya anti korupsi dan lain-lain yang termasuk dalam ranah pencegahan korupsi (recovery, preventive dan preemtif action).
5. Strategi Reformasi Birokrasi, sejak kelahirannya yang didasarkan pada misi yang diembannya KPK berusaha menempatkan diri sebagai *Role Model*, untuk memperbaiki Lembaga Negara dan Aparatur Pemerintah melalui Reformasi Birokrasi secara bertahap dan berlanjut melalui Penguatan Kelembagaan.

Selanjutnya strategi besar KPK dilaksanakan melalui Strategi Operasional yang dijabarkan dalam strategi – strategi pada setiap bidang KPK untuk tahun 2010 – 2014.

Jika dikaitkan dengan pendekatan Balanced Scorecard (BSC), secara sistematis hubungan antara tujuan dan sasaran strategis dapat dipetakan

sebagai berikut:

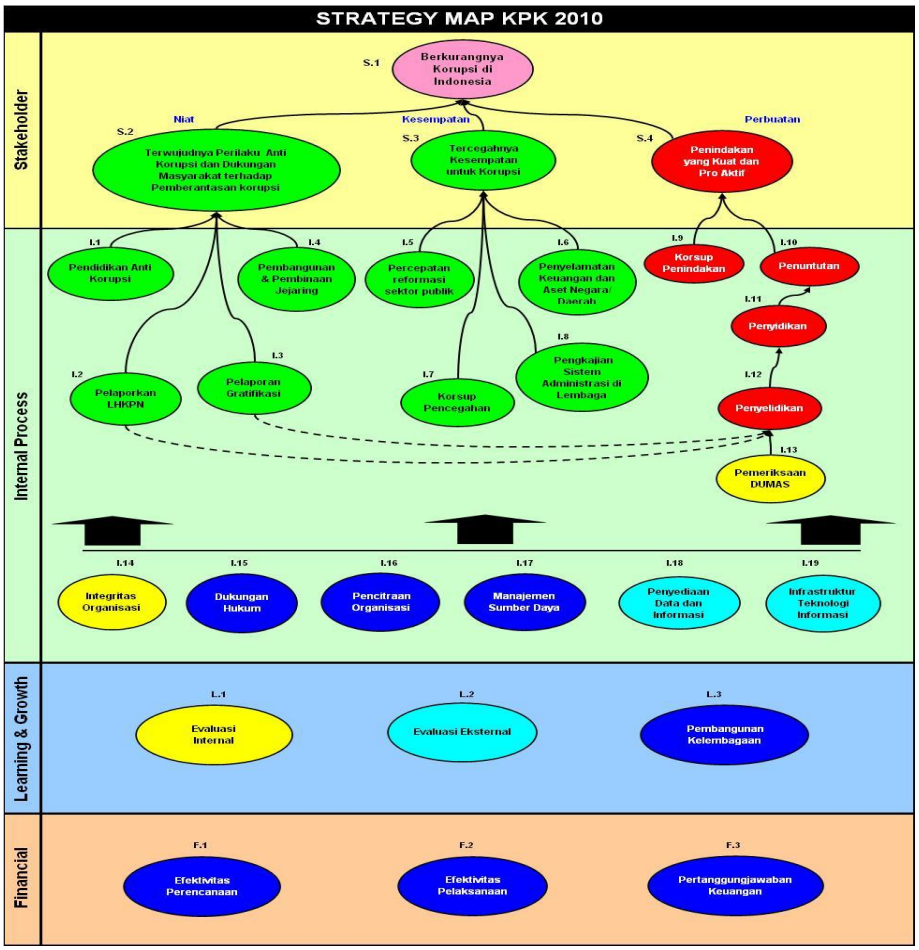

Pendapatan

PENDAPATAN KPK

Realisasi Pendapatan KPK bruto (sebelum dikurangi pengembalian PNBP) pada TA 2010 adalah sebesar Rp192.601.900.067,00. **Dibandingkan TA 2009, realisasi PNBP bruto TA 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp117.008.558.645,00 atau 154,79 persen**. Sedangkan realisasi Pendapatan KPK netto (setelah dikurangi pengembalian PNBP) pada TA 2010 adalah sebesar Rp192.465.480.067,00.

Belanja

BELANJA KPK

Realisasi belanja bruto KPK (**sebelum dikurangi pengembalian belanja**) TA 2010 sebesar Rp268.855.957.593,00 atau 52,87 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA sebesar Rp508.507.348.000,00. **Dibandingkan dengan TA 2009, realisasi belanja KPK TA 2009 lebih tinggi Rp39.595.067.080,00 atau 17,27 persen. Sedangkan realisasi belanja netto KPK (setelah dikurangi pengembalian belanja) TA 2010 sebesar Rp268.002.903.040,00.**

Menurut jenis belanja, realisasi bruto tersebut berasal dari belanja pegawai sebesar Rp157.954.723.164,00 atau 71,97 persen dari anggaran, belanja barang sebesar Rp70.888.164.447,00 atau 41,94 persen dari anggaran, dan belanja modal sebesar Rp40.013.069.982,00 atau 33,34 persen dari anggaran.

Apabila hanya memperhitungkan anggaran rupiah murni, maka realisasi

belanja bruto KPK mencapai Rp265.614.616.058,00 atau 61,62 persen dari anggarannya sebesar Rp431.065.431.000,00. Rendahnya realisasi belanja rupiah murni disebabkan oleh:

(iv) Pelaksanaan **kegiatan yang selalu mengedepankan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya sehingga terjadi penghematan dalam penggunaan anggaran operasional.**

(v) Adanya penghematan **dari proses pengadaan barang dan jasa sebesar Rp 9,768 milyar.**

Sedangkan realisasi belanja hibah mencapai Rp3.241.341.535,00 atau 4,19 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp77.441.917.000,00. Rendahnya realisasi anggaran hibah disebabkan antara lain oleh:

(i) **Tidak masuknya realisasi hibah barang atau jasa yang berasal dari World Bank – TF 090675 sebesar Rp1.534.590.000,00 yang telah mendapat pengesahan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan (DJ PU) ke Laporan Realisasi Anggaran. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah, yang menyatakan bahwa atas hibah yang terima dalam bentuk barang atau jasa dan telah disahkan oleh DJ PU, maka realisasi hibah dimaksud tidak masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran namun cukup diungkap oleh kementerian/lembaga dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

(ii) **Belum dapat disahkannya sesuai Peraturan Menteri Keuangan, realisasi pengeluaran atas hibah Uni Eropa, CIDA, GTZ, dan USAID. Pengajuan pengesahan ke Kementerian Keuangan masih menunggu data dukung atas realisasi pengeluaran hibah seperti rincian nilai atas barang dan jasa.**

Realisasi belanja berdasarkan program dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Realisasi Anggaran Berdasarkan Program

(dalam rupiah)

No	Program	Anggaran	Realisasi Bruto	Realisasi Netto	% Bruto
1.	Penerapan Kepemerintahan yang Baik	257.906.431.000	177.663.067.701	177.307.653.754	68,89
2.	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Negara	123.335.269.000	40.960.842.642	40.960.842.642	33,21
3.	Perencanaan Hukum	24.576.150.000	4.100.783.001	4.060.565.577	16,69
4.	Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	58.358.918.000	29.151.622.038	28.794.883.495	49,95
5.	Penegakan Hukum Dan HAM	26.369.600.000	11.248.460.128	11.228.825.078	42,66
6.	Peningkatan Kualitas Profesi Hukum	17.960.980.000	5.731.182.083	5.650.132.494	31,91
		508.507.348.000	**268.855.957.593**	**268.002.903.040**	**52,87**

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan KPK tahunan merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan termasuk di dalamnya jenjang struktural di bawah KPK seperti eselon I dan II yang bertanggungjawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. KPK merupakan satuan kerja dan tidak ada satuan kerja lain dibawah lembaga KPK.

Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

   Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan Laporan Realisasi Anggaran seluruh unit organisasi yang berada di bawah KPK. Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari Pendapatan Negara dan Belanja.

2. Neraca

   Neraca disusun berdasarkan kompilasi data dari unit-unit terkait di lingkungan KPK dan disusun melalui SAI.

3. Catatan atas Laporan Keuangan

   Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian LK TA 2010 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, dalam penyusunan LK KPK telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK KPK adalah:

(1) Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

(2) Belanja

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

(3) Aset

Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,

- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh KPK maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

(a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan

(b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

(c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Untuk BM/KN yang mempunyai nilai Aset Tetap di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana tersebut di atas dicatat didalam buku inventaris di luar pembukuan (ekstrakomptabel). Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor:01/KM.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Berdasarkan surat Kanwil Ditjen Kekayaan Negara No. S. 122/WKN.7/2008 tanggal 6 Februari 2008 perihal Koreksi/Update Data SABMN pada Satker dan Kementerian/Lembaga, setiap instansi diminta untuk melakukan koreksi atas nilai aset tetap yang diperoleh tahun 2004 ke bawah.

Sejak TA. 2007, Laporan Keuangan KPK telah menerapkan kebijakan pemerintah tersebut di atas.

c. Aset Lainnya

Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintahan yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan NAD.

Aset tak berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi *software* komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, tagihan TGR, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap KPK yang dihentikan dari penggunaan aktifnya. Serta uang pengganti yang belum dibayar terpidana

Di samping itu, piutang macet KPK yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara, juga termasuk dalam kelompok Aset lain-lain.

(4) Kewajiban

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang KPK. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) bruto (sebelum dikurangi pengembalian PNBP) yang dihasilkan KPK pada TA 2010 adalah sebesar Rp192.601.900.067,00 atau 125,90 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp152.980.250.000,00. Sedangkan realisasi PNBP Netto (setelah dikurangi pengembalian PNBP) adalah sebesar Rp192.465.480.067,00 atau sebesar 125,81 persen dari estimasi pendapatan.

Realisasi Belanja Negara bruto (sebelum dikurangi pengembalian belanja) untuk TA 2010 adalah sebesar Rp268.855.957.593,00 atau 52,87 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA sebesar Rp508.507.348.000,00. Sedangkan realisasi belanja netto (setelah dikurangi pengembalian belanja) adalah sebesar Rp268.002.903.040,00 atau 52,70 persen dari estimasi belanja. Realisasi belanja tersebut berasal dari realisasi belanja rupiah murni dan hibah.

Realisasi belanja rupiah murni bruto adalah sebesar Rp265.614.616.058,00 atau 61,62 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp431.065.431.000,00. Sedangkan realisasi belanja rupiah murni netto adalah sebesar Rp264.761.561.505,00 atau 61,42 persen dari anggarannya. Realisasi belanja hibah mencapai Rp3.241.341.535,00 atau 4,19 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp77.441.917.000,00. Tidak ada pengembalian belanja hibah sepanjang TA 2010 sehingga angka bruto dan netto untuk belanja hibah sama.

Realisasi Anggaran KPK disajikan dalam tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Realisasi Anggaran TA. 2010

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi Bruto	Realisasi Netto	% Real. Angg Bruto
1	**Pendapatan Negara dan Hibah**	**152.980.250.000**	**192.601.900.067**	**192.465.480.067**	**125,90**
	PNBP	152.980.250.000	192.601.900.067	192.465.480.067	125,90
2	**Belanja Negara**	**508.507.348.000**	**268.855.957.593**	**268.002.903.040**	**52,87**
	Belanja RM	431.065.431.000	265.614.616.058	264.761.561.505	61,62
	Belanja Hibah	77.441.917.000	3.241.341.535	3.241.341.535	4,19

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.2.1. Pendapatan Keuangan Negara

Realisasi Pendapatan Negara Bruto Rp192.601.900.067

Realisasi Pendapatan bruto yang dihasilkan KPK adalah sebesar Rp192.601.900.067,00. **Dibandingkan dengan realisasi PNBP bruto TA 2009, realisasi PNBP bruto TA 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp117.008.558.645,00 atau 154,79 persen. Sedangkan realisasi pendapatan netto TA 2010** adalah sebesar Rp192.465.480.067,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp116.872.138.645,00 dibandingkan dengan penghasilan netto TA 2009.

Realisasi pendapatan bruto dapat dilihat pada grafik berikut ini:

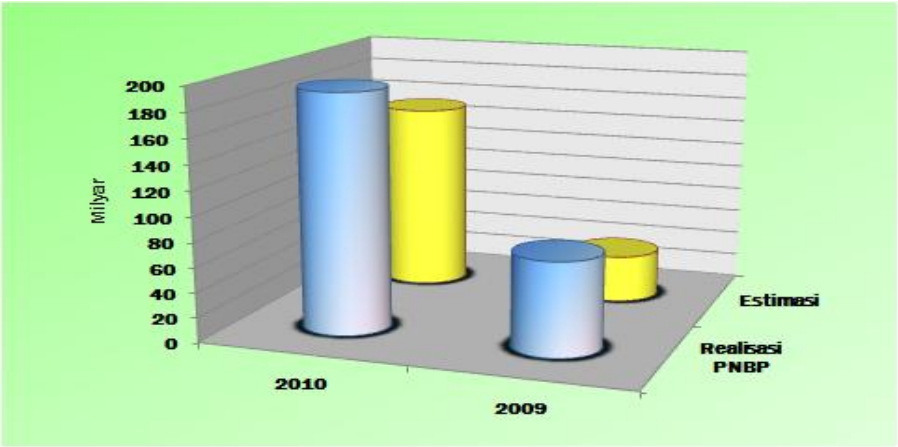

Grafik 1
Realisasi Pendapatan KPK

Realisasi PNBP bruto Rp192.601.900.067

B.2.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi PNBP bruto KPK TA 2010 adalah sebesar Rp192.601.900.067,00 atau 125,90 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp152.980.250.000,00. **Sedangkan realisasi pendapatan netto KPK TA 2010** adalah sebesar Rp192.465.480.067,00 atau 125,81 persen dari estimasi pendapatan.

PNBP ini berasal dari (a) PNBP Fungsional (penerimaan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi KPK) sebesar bruto Rp192.430.877.162,00 dan (b) PNBP umum (penerimaan yang terdapat pada semua kementerian negara/lembaga) sebesar Rp171.022.905,00. Tidak ada pengembalian pendapatan untuk PNBP umum **sehingga angka bruto dan netto untuk PNBP umum sama.**

(a) PNBP Fungsional

Rincian realisasi bruto PNBP fungsional dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini:

(dalam rupiah)

Jenis Pendapatan	TA 2010	TA 2009	% Naik (Turun)
Pendapatan Jasa Giro	2.957.906.610	1.726.285.777	71,35
Pendapatan Hasil Denda	5.842.000.000	7.600.000.000	(23,13)
Pendapatan Ongkos Perkara	505.000	787.500	(35,87)
Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi Yang Telah Ditetapkan Pengadilan	137.390.086.477	30.151.115.046	355,67
Pendapatan Gratifikasi Yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara	3.053.293.049	1.283.798.263	137,83
Pendapatan uang pengganti TPK yang ditetapkan Pengadilan	40.282.956.146	31.507.684.042	27,85
Pendapatan Penjualan Hasil Lelang TPK	2.904.129.880	2.623.055.500	10,72
Pendapatan Penjualan Lainnya	0	188.322.500	(100)
JUMLAH	**192.430.877.162**	**75.081.048.628**	**156,30**

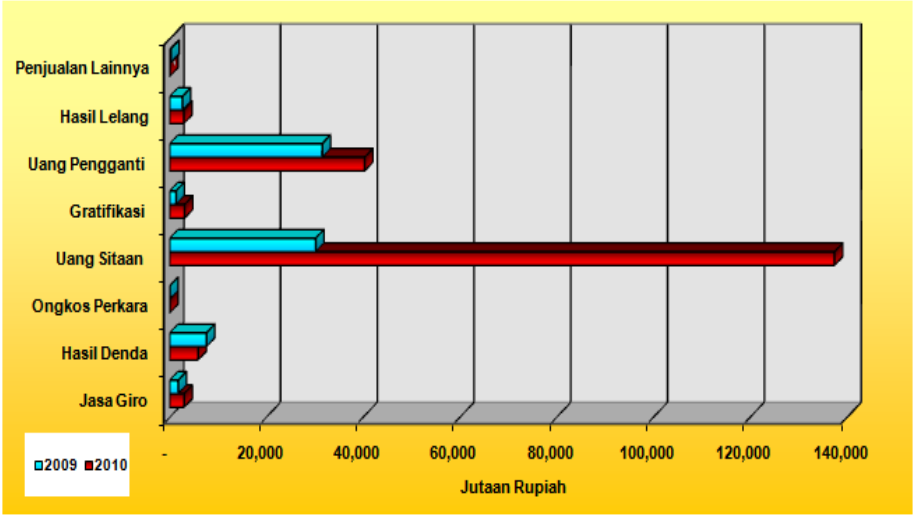

Grafik 2
Realisasi PNBP Fungsional

Pengembalian Pendapatan

Khusus untuk Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro), telah terjadi penarikan kembali PNBP pada Bulan Desember 2010, dari rekening kas negara ke rekening Bendahara Penerimaan KPK sebesar Rp136.420.000,00.

Penarikan terjadi karena Bendahara Penerimaan KPK melakukan penyetoran ke kas negara dengan akun jasa giro atas uang sitaan yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap seharusnya dikembalikan ke pemilik.

(b) PNBP Umum

Rincian realisasi bruto PNBP umum dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini:

(dalam rupiah)

Jenis Pendapatan	TA 2010	TA 2009	% Naik (Turun)
Pendapatan Jasa Giro	0	22.605.057	(100)
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	57.068.574	258.505.198	(77,92)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	0	38.264.984	(100)
Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL	0	13.335.627	(100)
Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	82.955.652	153.953.898	(46,12)
Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara	0	5.465.000	(100)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	30.998.679	20.163.030	53,74
JUMLAH	**171.022.905**	**512.292.794**	**(66,62)**

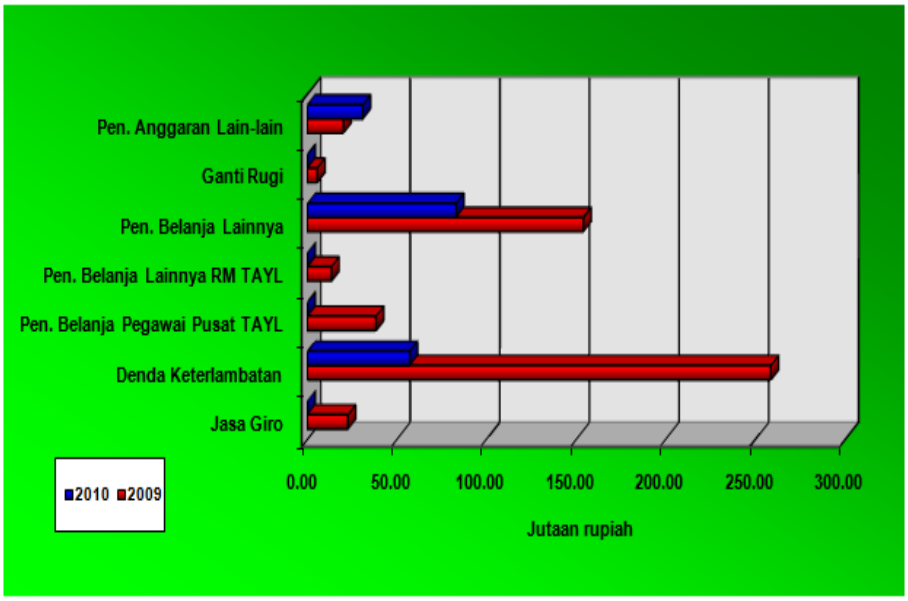

Grafik 3
Realisasi PNBP Umum

Realisasi Belanja Negara bruto Rp268.855.957.593

B.2.2. Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara bruto untuk TA 2010 adalah sebesar Rp268.855.957.593,00 atau 52,87 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA sebesar Rp508.507.348.000,00. Sedangkan realisasi belanja netto adalah sebesar Rp268.002.903.040,00 atau 52,70 persen dari anggaran. Dibandingkan dengan TA 2009, realisasi belanja bruto KPK TA 2009 lebih tinggi Rp39.595.067.080,00 atau 17,27 persen.

Dari realisasi belanja bruto KPK secara keseluruhan yaitu sebesar 52,87 persen, realisasi belanja bruto rupiah murni adalah sebesar 61,62 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan realisasi belanja hibah mencapai 4,19 persen dari yang dianggarkan.

Rendahnya penyerapan belanja rupiah murni disebabkan antara lain oleh:

a) Pelaksanaan kegiatan yang selalu mengedepankan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya sehingga terjadi penghematan dalam penggunaan anggaran operasional.

b) Adanya penghematan dari proses pengadaan barang dan jasa sebesar Rp 9,768 milyar.

Sedangkan rendahnya realisasi anggaran hibah disebabkan antara lain oleh:

- Tidak masuknya realisasi hibah barang atau jasa yang berasal dari World Bank – TF 090675 sebesar Rp1.534.590.000,00 yang telah mendapat pengesahan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan (DJ PU) ke Laporan Realisasi Anggaran. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah, yang menyatakan bahwa atas hibah yang terima dalam bentuk barang atau jasa dan telah disahkan oleh DJ PU, maka realisasi hibah dimaksud tidak masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran namun cukup diungkap oleh kementerian/lembaga dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- Belum dapat disahkannya sesuai Peraturan Menteri Keuangan, realisasi

pengeluaran atas hibah Uni Eropa, CIDA, GTZ, dan USAID. Pengajuan pengesahan ke Kementerian Keuangan masih menunggu data dukung atas realisasi pengeluaran hibah seperti rincian nilai atas barang dan jasa.

Komposisi realisasi belanja bruto disajikan dalam grafik 4 berikut ini:

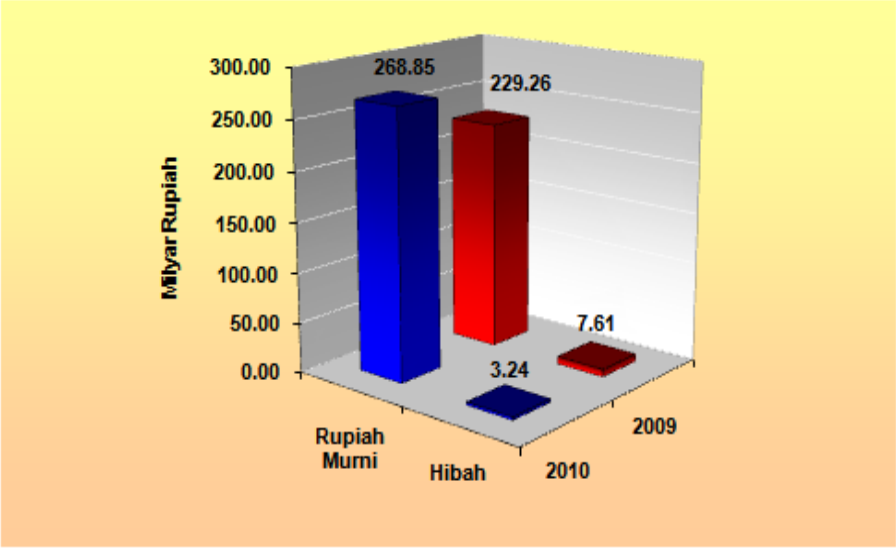

Grafik 4
Komposisi Alokasi Belanja TA 2010 dan 2009

Belanja

Realisasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari (i) Belanja Pegawai, (ii) Belanja Barang, dan (iii) Belanja Modal.

Rincian Anggaran dan realisasi belanja per jenis belanja menurut sumber pembiayaan dapat dilihat pada tabel 3, 4, dan 5 berikut ini:

Tabel 3
Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2010 per Jenis Belanja
(Rupiah Murni dan Hibah)

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Bruto	Realisasi Netto	% Bruto
51	Belanja pegawai	219.471.849.000	157.954.723.164	157.599.309.217	71,97
52	Belanja Barang	169.016.727.000	70.888.164.447	70.390.523.841	41,94
53	Belanja Modal	120.018.772.000	40.013.069.982	40.013.069.982	33,34
JUMLAH		**508.507.348.000**	**268.855.957.593**	**268.002.903.040**	**52,87**

Tabel 4
Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2010 per jenis Belanja
(Rupiah Murni)

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Bruto	Realisasi Netto	% Bruto
51	Belanja Pegawai	219.471.849.000	157.954.723.164	157.599.309.217	71,97
52	Belanja Barang	131.933.045.000	67.682.322.912	67.184.682.306	51,30
53	Belanja Modal	79.660.537.000	39.977.569.982	39.977.569.982	50,18
JUMLAH		**431.065.431.000**	**265.614.616.058**	**264.761.561.505**	**61,62**

Tabel 5
Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2010 Per jenis belanja
(Hibah)

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Bruto	Realisasi Netto	% Bruto
51	Belanja pegawai	0	0		0
52	Belanja Barang	37.083.682.000	3.205.841.535	3.205.841.535	8,64
53	Belanja Modal	40.358.235.000	35.500.000	35.500.000	0,09
JUMLAH		**77.441.917.000**	**3.241.341.535**	**3.241.341.535**	**4,19**

Pengembalian Belanja Rp853.054.553,00

Pengembalian Belanja

Sampai dengan akhir TA 2010, terdapat pengembalian belanja sebesar Rp853.054.553,00 yang berasal dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang. Rincian pengembalian belanja dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Pengembalian Belanja TA 2010

(dalam rupiah)

Akun	Uraian Belanja	Realisasi Pengembalian
511511	Belanja Pokok Pegawai Non PNS	270.024.764
511512	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	85.389.183
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	700.000
521211	Belanja Bahan	442.500
522115	Belanja Jasa Profesi	1.860.000
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	90.000
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	49.743.703
524219	Belanja Perjalanan lainnya – Luar Negeri	444.804.403
JUMLAH		**853.054.553**

Pengembalian belanja yang terkait dengan belanja pegawai terjadi karena adanya kekeliruan dalam perhitungan gaji sehingga untuk kelebihan gaji yang telah diterima dikembalikan ke kas negara.

Pengembalian belanja perjalanan dinas disebabkan terutama oleh penggunaan metode langsung (SPM-LS Bendahara) untuk perjalanan dinas luas negeri.

Belanja Pegawai Bruto Rp157.954.723.164

B.2.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai bruto TA 2010 adalah sebesar Rp157.954.723.164,00 atau 71,97 persen dari anggarannya. Dibandingkan dengan TA 2009, realisasi Belanja Pegawai bruto TA 2010 lebih tinggi sebesar Rp15.803.296.730,00 atau 11,12 persen. Sedangkan realisasi Belanja Pegawai netto TA 2010 sebesar Rp157.599.309.217,00 atau 71,81 persen dari anggarannya.

Belum optimalnya realisasi belanja pegawai disebabkan oleh tidak terealisirnya rencana penambahan pegawai KPK untuk memenuhi kuota 800 orang pegawai.

Rincian realisasi Belanja Pegawai bruto/netto adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Akun	TA 2010 Bruto	TA 2010 Netto	TA 2009 Bruto	% naik (turun) Bruto
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	4.358.694.775	4.358.694.775	4.993.380.611	(12,71)
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai non PNS	153.596.028.389	153.240.614.442	137.158.045.823	11,98
Total	**157.954.723.164**	**157.599.309.217**	**142.151.426.434**	**11,12**

Belanja Barang Bruto Rp70.888.164.447,00

B.2.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang bruto TA 2010 adalah sebesar Rp70.888.164.447,00 atau 41,94 persen dari anggarannya. Dibandingkan dengan TA 2009, realisasi Belanja Barang bruto TA 2010 lebih tinggi Rp1.144.088.108,00 atau 1,64 persen. Sedangkan realisasi Belanja Barang netto TA 2010 sebesar Rp70.390.523.841,00 atau 33,60 persen dari anggarannya.

Rendahnya realisasi belanja barang secara keseluruhan yaitu sebesar 41,94 persen secara umum disebabkan oleh rendahnya penyerapan belanja barang rupiah murni dan rendahnya realisasi belanja barang dari hibah. Realisasi Belanja Barang Rupiah Murni sebesar Rp67.682.322.912,00 atau 51,30 persen dari anggarannya, sedangkan realisasi Belanja Barang Hibah sebesar Rp3.205.841.535,00 atau 8,64 persen dari anggarannya.

Rendahnya realisasi belanja barang rupiah murni disebabkan antara lain oleh:

a) Adanya penghematan dari proses pengadaan barang dan jasa sebesar Rp9,768 milyar;

b) Pelaksanaan kegiatan yang selalu mengedepankan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya sehingga terjadi penghematan dalam penggunaan anggaran operasional sekitar 17 milyar.

Sedangkan rendahnya realisasi belanja barang hibah disebabkan oleh:

1. Tidak masuknya realisasi hibah barang atau jasa yang berasal dari World Bank – TF 090675 sebesar Rp1.534.590.000,00 yang telah mendapat pengesahan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan (DJ PU).

   Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.05/2009 tentang

Sistem Akuntansi Hibah, atas hibah yang terima dalam bentuk barang atau jasa dan telah disahkan oleh DJ PU dalam bentuk Surat Pengesahan Hibah berupa Barang atau Jasa (SPH-BJ), maka realisasi hibah dimaksud tidak masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran namun cukup diungkap oleh kementerian/lembaga dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Belum dapat disahkannya sesuai Peraturan Menteri Keuangan, realisasi pengeluaran atas hibah Uni Eropa, CIDA (canada), GTZ, dan USAID. Pengajuan pengesahan ke Kementerian Keuangan masih menunggu data dukung atas realisasi pengeluaran hibah seperti rincian nilai atas barang dan jasa untuk hibah USAID dan CIDA serta menunggu angka realisasi aktual hasil audit eksternal untuk hibah GTZ dan Uni Eropa.

Rincian masing-masing realisasi Belanja Barang bruto/netto adalah sebagai berikut:

- Rupiah Murni:

(dalam rupiah)

Akun	TA 2010 Bruto	TA 2010 Netto	TA 2009 Bruto	% naik (turun) Bruto
Belanja Barang Operasional	12.623.735.613	12.623.035.613	16.717.341.471	(24,49)
Belanja Barang Non Operasional	14.869.225.095	14.868.782.595	10.145.624.035	46,56
Belanja Jasa	17.630.679.548	17.628.819.548	15.359.504.647	14,79
Belanja Pemeliharaan	5.103.708.373	5.103.618.373	6.288.671.348	(18,84)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	13.864.479.201	13.814.735.498	11.433.068.816	21,27
Belanja Perjalanan Luar Negeri	3.590.495.082	3.145.690.679	2.279.990.639	57,48
Jumlah	**67.682.322.912**	**67.184.682.306**	**62.224.200.956**	**8,77**

- Hibah:

(dalam rupiah)

Akun	TA 2010 Bruto	TA 2010 Netto	TA 2009 Bruto	% naik (turun) Bruto
Belanja Barang Operasional	0	0	0	0
Belanja Barang Non Operasional	3.205.841.535	3.205.841.535	7.305.736.310	(56,12)
Belanja Jasa	0	0	0	0
Belanja Pemeliharaan	0	0	0	0
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	0	0	214.139.073	(100)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	0	0	0	0
Jumlah	**3.205.841.535**	**3.205.841.535**	**7.519.875.383**	**(57,37)**

Belanja Modal Bruto/Netto Rp40.013.069.982,00

B.2.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal bruto/netto TA. 2010 adalah sebesar Rp40.013.069.982,00 atau 33,34 persen dari anggarannya. Dibandingkan dengan TA 2009, Belanja Modal TA 2010 lebih tinggi Rp22.647.682.242,00 atau 130,42 persen. Tidak ada pengembalian belanja untuk Belanja Modal sehingga angka bruto dan netto Belanja Modal sama.

Rendahnya realisasi belanja modal secara keseluruhan yaitu sebesar 33,34 persen secara umum disebabkan oleh rendahnya penyerapan belanja modal rupiah murni dan hibah. Realisasi Belanja Modal Rupiah Murni sebesar Rp39.977.569.982,00 atau 50,18 persen dari anggarannya, sedangkan realisasi Belanja Modal Hibah sebesar Rp35.500.000,00 atau 0,09 persen dari anggarannya.

Rendahnya realisasi belanja modal rupiah murni disebabkan antara lain oleh adanya pembintangan dana rencana pembangunan gedung KPK sebesar Rp7,163 milyar.

Sedangkan rendahnya realisasi belanja modal dari hibah disebabkan antara lain oleh belum adanya data dukung atas realisasi pengeluaran hibah seperti rincian nilai atas barang yang diserahkan.

Rincian realisasi Belanja Modal bruto/netto adalah sebagai berikut:

- Rupiah Murni

(dalam rupiah)

Akun	TA 2010	TA 2009	% naik (turun)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.792.624.939	15.622.797.201	141,92
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.448.308.614	470.537.325	207,80
Belanja Modal Jaringan	0	8.500.000	(100)
Belanja Modal Fisik Lainnya	736.636.429	1.171.603.214	(37,13)
Jumlah	**39.977.569.982**	**17.273.437.740**	**131,44**

- hibah

(dalam rupiah

Akun	TA 2010	TA 2009	% naik (turun)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.500.000	91.950.000	(61,39)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Fisik Lainnya	0	0	0,00
Jumlah	**35.500.000**	**91.950.000**	**(61,39)**

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Penyelamatan Aset/Kekayaan Negara

a. Kajian Kegiatan Usaha Hulu Migas

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan terhadap sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) dan rekomendasi perbaikan yang disampaikan kepada BP Migas, KPK berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara sebesar USD 271,046.859.68 atau setara dengan Rp 2.995.023.037.926,- dari penyetoran dana *Abandonment and Site Restoration* (ASR) dan koreksi pembebanan insentif Kredit Investasi (*Investment Credit*).

b. Penertiban Barang Milik Negara

Penyelamatan potensi kerugian negara sebagai akibat pengalihan hak aset/Barang Milik Negara pada 16 Kementerian Negara/Lembaga pada tahun 2010 adalah sebesar Rp526.266.022.256,00. Rincian dan perbandingannya dengan 2009 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Kementerian/Lembaga	2009	2010	Jumlah
1.	Kementrian Hukum & HAM	70.897.700.000	0	70.897.700.000
2.	Kementrian Agama	14.631.880.000	67.254.838.360	81.886.718.360
3.	Kementrian Sekrearіat Negara	104.818.331.000	0	104.818.331.000
4.	Kementrian PU	10.455.648.000	0	10.455.648.000
5.	Perum Bulog	11.380.962.000	14.193.198.000	25.574.160.000
6.	PT Kereta Api	6.479.187.000	0	6.479.187.000
7.	BKKBN	7.140.549.000	0	7.140.549.000
8.	Kementrian Luar Negeri	41.175.416.000	0	41.175.416.000
9.	Kementrian Kesehatan	25.119.851.000	96.243.044.339	121.362.895.339
10.	Kementrian Keuangan (DJP)	1.652.615.583.000	0	1.652.615.583.000
11.	Perum Pegadaian	16.176.211.000	3.240.041.291	19.416.252.291
12.	Asuransi Jiwasraya	9.013.120.000	2.394.777.352	11.407.897.352
13.	Kementrian Diknas (Unibraw)	43.834.461.000	1.650.886.000	45.485.347.000
14.	Kementrian Diknas (ITS))	0	1.193.900.000	1.193.900.000
15.	Kementrian Diknas (Udayana)	0	12.269.662.214	12.269.662.214
16.	Kementrian Diknas (Unila)	0	1.486.733.000	1.486.733.000
17.	Kementrian Diknas (Univ. Palangkaraya)	0	6.746.987.700	6.746.987.700
18.	Kementrian Diknas (Universitas Surabaya)	0	21.297.062.500	21.297.062.500
19.	Kementrian Diknas (Unair)	0	17.044.233.500	17.044.233.500
20.	Kementrian Diknas (USU)	0	92.512.400.000	92.512.400.000
21.	Fasum & Fasos Pemko Surabaya	0	36.654.150.000	36.654.150.000
22.	Kementrian ESDM	0	15.110.000.000	15.110.000.000
23.	PT PLN	0	136.974.108.000	136.974.108.000
Jumlah		**2.013.738.899.000**	**526.266.022.256**	**2.540.004.921.256**

2. Hibah yang diterima KPK

Semua hibah yang diterima KPK telah dimasukkan kedalam DIPA setelah mendapat nomor register dari Departemen Keuangan. Hal ini telah dilaksanakan KPK sejak tahun 2005.

Realisasi Hibah KPK sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

Donor	Pagu (Rp)	Pengesahan (Rp)	Realisasi Riil (Rp)	Ket.
Denmark-Danida2	2,924,053,000	2,924,052,875	2,924,052,875	*Closed 31 Des 2010*
USAID-MCC	37,801,402,000	0	53,214,828,225	*Closed 31 Des 2010*
GTZ 2	6,508,150,000	0	7,500,086,600	*Closed 30 Juni 2011*
Uni Eropa	11.715.722.000	0	2,100,000,000	*Closed 31 Des 2012*
World Bank 2	1,534,590,000	1,534,590,000	1,534,590,000	*Closed 31 Des 2011*
CIDA 2	15,943,000,000	0	3,184,731,000	*Closed 14 Mei 2013*
World Bank 3	1,015,000,000	317,288,660	327,274,593	*Closed 30 Juni 2012*
TOTAL	**77.441.917.000**	**4,775,931,535**	**70,785,563,293**	

Penjelasan masing-masing hibah:

- **DANIDA 2 - Denmark Proyek *Danish International Development Agency Supporting Selected KPK (Closing date* 31 Desember 2010)**

  Realisasi per 31 Desember 2010 sebesar Rp 2.924.052.000 adalah untuk membiayai pengadaan mobil unit information event, pembayaran Konsultan, biaya operasional, pengadaan perlengkapan untuk mendukung kampanye, kegiatan TOT Guru, Mahasiswa, cetak modul, penyelenggaraan Mall to Mall.

  Atas realisasi hibah tersebut telah disahkan oleh KPPN Jakarta VI.

- **World Bank TF 090675 – Project Support to KPK (*Closing date* 31 Desember 2011)**

  Realisasi per 31 Desember 2010 sebesar Rp1.534.590.000 adalah membiayai beasiswa S2 UI dan ITB bagi pegawai KPK.

  Atas realisasi hibah tersebut telah disahkan oleh Ditjen Pengelolaan Utang melalui surat Surat Pengesahan Hibah Barang dan Jasa.

- **GTZ (Jerman) *GTZ, Project Support for Anti Corruption Clearing House of CEC* (*Closing Date* 30 Juni 2011)**

  Pagu hibah Tahun 2010 sebesar Euro 800,00, realisasi berdasarkan informasi yang diperoleh pihak donor sebesar 95% atau Euro 760,000 eq Rp7.500.086.600

  Hibah tersebut diterima dalam bentuk barang dan jasa antara lain berupa peralatan multimedia, buku perpustakaan, server, buku Memahami Untuk Membasmi, plakat, software, BI LHKPN.

  Sampai dengan saat ini KPK belum dapat mengajukan permohonan pengesahan atas realisasi tersebut kepada Kemenkeu. Karena donor belum dapat memberikan angka realisasi secara aktual untuk tahun 2010 disebabkan karena proses audit yang dilakukan oleh external auditor GTZ belum selesai.

- **Uni Eropa - *To Strengthen the Rule of Law and Security in Indonesia (closing date 2012)***

  Pagu Hibah tahun 2010 sebesar 11.715.722.000, realisasi berdasarkan informasi yang diperoleh pihak donor sebesar eq Rp 2.100.000.000 .

  Hibah tersebut diterima dalam bentuk barang dan jasa untuk kegiatan

koordinasi dan supervisi di antara institusi/lembaga penegak hukum; pemberantasan korupsi dengan fokus pencegahan korupsi dan partisipasi masyarakat; tehnik investigasi, penuntutan dan koordinasi melalui pelatihan dengan instansi terkait KPK, BPK, Polisi, Pengadilan Tipikor; dan *technical assistance* untuk meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi sistem RAN PK.

Sampai dengan saat ini KPK belum dapat mengajukan permohonan pengesahan atas realisasi hibah tersebut kepada Kemenkeu. Karena donor belum dapat memberikan angka realisasi secara aktual untuk tahun 2010 disebabkan karena proses audit yang dilakukan oleh external auditor EU belum selesai.

- **USAID-MCC *Millenium Challenge Corporation (MCC) Indonesia /Control of Corruption Project* (*Closing Date* 31 Desember 2010)**

Pagu Hibah tahun 2010 sebesar Rp37.801.402.000, realisasi berdasarkan informasi yang diperoleh pihak donor ralisasi sebesar eq Rp 53.214.828.225 .

Hibah tersebut diterima dalam bentuk barang dan jasa berupa pengadaan terestrial trunking radio, court *recording, pengadaan konsultan*

Sampai dengan saat ini KPK belum dapat mengajukan permohonan pengesahan atas realisasi hibah tersebut kepada Kemenkeu, serta belum dapat memasukkan dalam Neraca, karena sampai dengan akhir Desember 2010 donor belum dapat memberikan rincian atas realisasi barang dan jasa yang diberikan kepada KPK.

- **Kanada – CIDA**
Project Support To Indonesia's Island of Integrity Program for Sulawesi (SIPS) (Closing date 14 Mei 2013)

Pagu Hibah tahun 2010 sebesar Rp.15.943.000.000, realisasi berdasarkan surat dari donor sebesar CAD 353,859 eq. Rp3.184.731.000, untuk pengadaan equipment dan kendaraan, pengadaan jasa konsultan, biaya operasional, training dan workshop.

Sampai dengan saat ini KPK belum dapat mengajukan permohonan pengesahan atas realisasi hibah tersebut kepada Kemenkeu, serta belum dapat memasukkan dalam Neraca, karena sampai dengan akhir Desember 2010 donor belum dapat memberikan rincian atas realisasi barang dan jasa yang diberikan kepada KPK.

- **World Bank TF094467**
(Governance Partnership Facility Grant Agreement - Supporting the Indonesian Corruption Eradication Commission's Corruption Prevention Strategy)

Pagu Hibah tahun 2010 sebesar Rp1.015.000.000,00, realisasi per 31 desember 2010 sebesar Rp317.288.660,00 atau 31,26%

Tujuan hibah tersebut adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam memantau pelaksanaan pelayanan public melalui system pengaduan masyarakat (dana BOS dan BPN) dan review business process.

Bantuan hibah tersebut berupa uang yang dicairkan melalui mekanisme Rekening Khusus.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM

Posisi Keuangan per 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut: Aset sebesar Rp774.750.005.953,00 **atau lebih tinggi 82,68 persen dibandingkan dengan aset per 31 Desember 2009; kewajiban sebesar Rp3.891.752.442,00 atau lebih tinggi 24,75 persen dibandingkan dengan kewajiban per 31 Desember 2009; sedangkan Ekuitas Dana sebesar** Rp770.858.253.511,**00 atau lebih tinggi 83,11 persen dibandingkan ekuitas dana per 31 Desember 2009.**

Komposisi Neraca per 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Kenaikan/ (Penurunan)
Aset	774.750.005.953	424.106.160.676	350,643,845,277
Kewajiban	3.891.752.442	3.119.555.905	772.196.537
Ekuitas Dana	770.858.253.511	420.986.604.771	349,871,648,740

Jumlah Aset per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp774.750.005.953,**00 terdiri dari** Aset Lancar sebesar Rp17.399.903.736,00; Aset Tetap sebesar Rp367.183.731.838,00; dan Aset Lainnya sebesar Rp390.166.370.379,00.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2010 sebesar Rp3.891.752.442,00 merupakan kewajiban jangka pendek sebesar Rp3.891.752.442,00.

Jumlah Ekuitas Dana per 31 Desember 2010 sebesar Rp770.858.253.511,00 terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp13.508.151.294,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp757.350.102.217,00.

Komposisi Neraca KPK dibandingkan dengan periode sebelumnya dapat dilihat pada grafik 6 berikut ini:

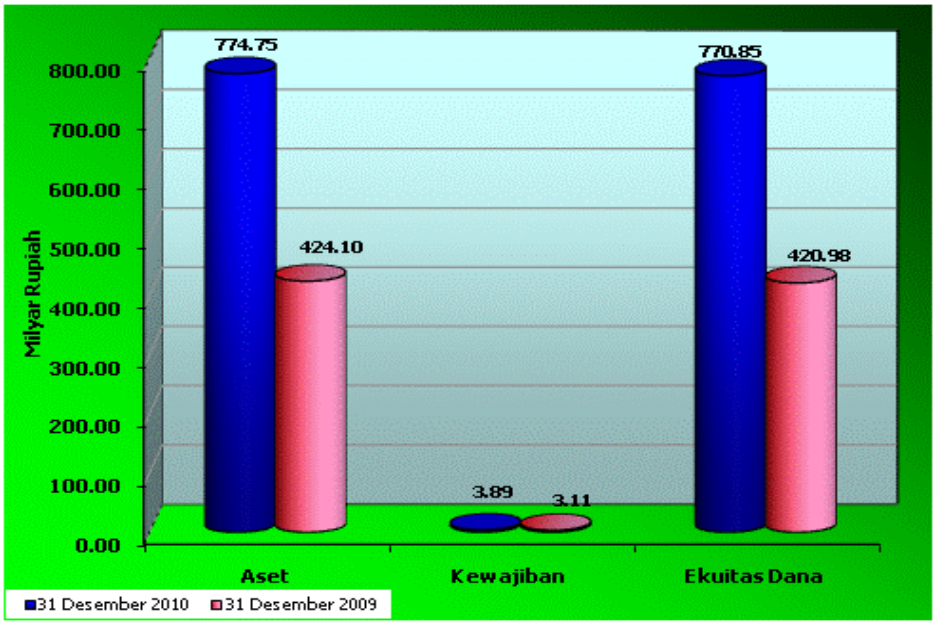

Grafik 6
Struktur Neraca KPK per 31 Desember 2010 dan 2009

C.2 PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1 Aset Lancar

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0,00

C.2.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca adalah sebesar Rp0,00. Tidak ada perbedaan Kas di Bendahara Pengeluaran untuk TA. 2010 dan 2009.

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0,00

C.2.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan